

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak otonomi daerah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 diharapkan pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Juli (2010:1) yang menyatakan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bawono, 2008:1).

Namun seiring dengan diterapkannya otonomi daerah mengakibatkan ketidakstabilan kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota utamanya dalam hal keuangannya karena kinerja keuangan menjadi tolak ukur kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota (Bawono, 2008:1). Hal ini memang menjadi konsekuensi logis daerah otonom yakni pemerintah daerah harus lebih mandiri dari segala hal

termasuk dari segi keuangan.

Landasan yuridis yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah telah diperbaharui sebanyak 2 kali. Pada awal diberlakukannya landasan yuridis yang mengatur adalah berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Dan kini seiring dengan semakin berkembangnya otonomi daerah, UU tersebut telah diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang begitu luas bagi daerah. Hal ini di satu sisi merupakan berkat, namun disisi lain sekaligus merupakan beban yang pada saatnya nanti akan menuntut kesiapan daerah untuk dapat melaksanakannya. Dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka beberapa aspek harus dipersiapkan, antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta organisasi dan manajemennya (Priyo Hari Adi, 2006:1).

Kemampuan daerah dalam mengolah sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan bagi daerah. Pengelolaan daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi, dan dapat menambah pendapatan bagi daerah. Daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah tidak lain adalah untuk lebih

meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah (Maimunah, 2006).

Visi otonomi dari sudut pandang ekonomi mempunyai tujuan akhir untuk membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Priyo Hari Adi, 2006:1).

Pada akhirnya pemerintah akan melakukan transfer dana. Transfer dana ini berupa dana perimbangan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, pemerintah pusat mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma

dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas *vertikal* (kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas *horizontal* (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2005:3). Tujuan otonomi adalah lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. (Priyo Hari Adi, 2006:1).

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Laporan Realisasi APBD dapat kita lihat gambaran dari belanja daerah dari masing-masing Kabupaten dan Kota yang diteliti. Pada tabel 1.1 berikut ini disajikan data pertumbuhan belanja daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat.

Tabel 1.1
Data Pertumbuhan Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat (dalam ribu rupiah)

No.	Nama Kab/Kota	Belanja Daerah (Rp)		%
		2012	2013	Pertumbuhan
1	Kabupaten Bogor	3.674.001.336	4.914.826.646	33,77%
2	Kabupaten Sukabumi	1.999.104.665	1.983.747.611	-0,76%
3	Kabupaten Cianjur	1.973.180.986	2.181.991.019	10,58%
4	Kabupaten Bandung	2.850.023.254	2.803.353.394	-1,63%
5	Kabupaten Garut	2.131.967.233	2.737.448.438	28,4%
6	Kabupaten Tasikmalaya	1.829.410.194	1.589.896.585	-13,09%
7	Kabupaten Ciamis	1.839.000.682	1.738.361.477	-5,47%
8	Kabupaten Kuningan	1.434.011.695	1.624.481.863	13,28%
9	Kabupaten Cirebon	2.033.136.939	2.289.934.719	12,63%
10	Kabupaten Majalengka	1.525.924.588	1.766.186.512	15,74%
11	Kabupaten Sumedang	1.467.551.208	1.643.664.109	12%
12	Kabupaten Indramayu	1.843.450.693	2.090.849.042	13,42%
13	Kabupaten Subang	1.481.609.293	1.547.392.028	4,43%
14	Kabupaten Purwakarta	1.138.170.000	1.408.664.932	23,76%
15	Kabupaten Karawang	2.416.221.776	2.778.186.807	14,98%
16	Kabupaten Bekasi	2.639.023.961	3.083.568.048	16,84%
17	Kab. Bandung Barat	1.501.192.558	1.436.967.507	-4,27%
18	Kota Bogor	1.355.492.925	1.542.058.104	13,76%
19	Kota Sukabumi	674.879.856	842.203.912	24,79%
20	Kota Bandung	3.490.035.513	4.555.422.014	30,52%
21	Kota Cirebon	813.671.540	938.786.343	17,37%
22	Kota Bekasi	2.499.559.814	3.026.035.751	21,06%
23	Kota Depok	1.371.444.185	1.817.100.741	32,49%
24	Kota Cimahi	833.552.564	1.027.590.600	23,37%
25	Kota Tasikmalaya	1.035.009.274	1.094.070.203	5,7%
26	Kota Banjar	513.257.046	570.635.296	11,17%
TOTAL		46.363.883.778	53.033.423.701	14,38%

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Barat

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bagaimana gambaran pertumbuhan belanja daerah dari masing-masing Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat. Nilai rata-rata pertumbuhan belanja daerah untuk Kabupaten dan Kota di Jawa Barat menunjukkan angka 12%. Untuk nilai tertinggi pertumbuhan belanja daerah

dicapai atau dilakukan oleh Kabupaten Bogor yang mencapai nilai 33,77 %. sedangkan nilai belanja daerah terendah yaitu -13,09% dilakukan oleh Kabupaten Tasikmalaya.

Nilai pertumbuhan yang tidak merata menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerahnya pun tidak merata, sebagian daerah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sebagian lagi menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah. Perbedaan yang signifikan dari pertumbuhan belanja daerah untuk Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat menunjukkan telah terjadi kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah yang pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antar daerah.

Di sisi lain, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam kebijakan otonomi daerah disambut baik, karena terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Salah satu harapan dari kebijakan tersebut adalah daerah diberi kesempatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumberdaya, kebijakan demikian akan memberatkan. Daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya dalam hal sumber keuangan atau dana yang melimpah akan mengalami kesulitan dalam membiayai belanja daerahnya (Askam Tuasikal, 2008).

Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena setiap masyarakat

memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaannya dari sektor pendapatan asli daerah disamping dari bantuan pemerintah pusat berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus agar mampu membiayai pengeluaran daerahnya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah dengan adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (Halim, 2008).

Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja. Jumlah belanja daerah dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Dengan menemukan bahwa besarnya belanja modal sangat ditentukan oleh faktor dana alokasi umum (Adi, 2006).

Akan tetapi dengan melihat fenomena umum yang terjadi, sepertinya alokasi belanja daerah belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah belum terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Halim dan Abdullah (2007:18) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di

masyarakat. Padahal menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Tabel 1.2
Data Realisasi Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat (dalam milyar rupiah)

No.	Nama Kab/Kota	Dana Alokasi Umum (Rp)		Naik/ Turun	Belanja Daerah (Rp)		Naik/ Turun
		2012	2013		2012	2013	
1	Kabupaten Bogor	1.672	1.887	Naik	3.674	4.914	Naik
2	Kabupaten Sukabumi	1.193	1.331	Naik	1.999	1.983	Turun
3	Kabupaten Cianjur	1.168	1.305	Naik	1.973	2.181	Naik
4	Kabupaten Bandung	1.518	1.730	Naik	2.850	2.803	Turun
5	Kabupaten Garut	1.385	1.563	Naik	2.131	2.737	Naik
6	Kabupaten Tasikmalaya	1.083	1.225	Naik	1.829	1.589	Turun
7	Kabupaten Ciamis	1.165	1.303	Naik	1.839	1.738	Turun
8	Kabupaten Kuningan	892	998	Naik	1.434	1.624	Naik
9	Kabupaten Cirebon	1.135	1.280	Naik	2.033	2.289	Naik
10	Kabupaten Majalengka	1.029	995	Turun	1.525	1.766	Naik
11	Kabupaten Sumedang	923	1.036	Naik	1.467	1.643	Naik
12	Kabupaten Indramayu	1.017	1.134	Naik	1.843	2.090	Naik
13	Kabupaten Subang	917	1.032	Naik	1.481	1.547	Naik
14	Kabupaten Purwakarta	635	772	Naik	1.138	1.408	Naik
15	Kabupaten Karawang	1.004	1.134	Naik	2.416	2.778	Naik
16	Kabupaten Bekasi	962	1.083	Naik	2.639	3.083	Naik
17	Kab. Bandung Barat	804	909	Naik	1.501	1.436	Turun
18	Kota Bogor	603	686	Naik	1.355	1.542	Naik
19	Kota Sukabumi	401	449	Naik	674	842	Naik
20	Kota Bandung	1.323	1.485	Naik	3.490	4.555	Naik
21	Kota Cirebon	551	536	Turun	813	938	Naik
22	Kota Bekasi	935	1.051	Naik	2.499	3.026	Naik
23	Kota Depok	674	774	Naik	1.371	1.817	Naik
24	Kota Cimahi	440	489	Naik	833	1.027	Naik
25	Kota Tasikmalaya	582	657	Naik	1.035	1.094	Naik
26	Kota Banjar	281	317	Naik	513	570	Naik
TOTAL		24.304	27.124		46.363	53.033	

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 1.2 Realisasi Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012 dan 2013 di atas terdapat beberapa fenomena diantaranya terjadi peningkatan dana alokasi umum namun tidak diikuti oleh belanja daerah yang mana mengalami penurunan hal ini terjadi di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan, terdapat juga fenomena penurunan dana alokasi umum tetapi belanja daerah malah mengalami peningkatan yang cukup besar hal ini dapat dilihat pada Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan pada pemerintah daerah yang mana adanya penurunan dana alokasi umum tetapi malah mengalami peningkatan belanja daerah yang cukup besar. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dana alokasi umum sebagaimana mestinya yaitu pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Tabel 1.3

Data Realisasi Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat (dalam milyar rupiah)

No.	Nama Kab/Kota	Dana Alokasi Khusus (Rp)		Naik/Turun	Belanja Daerah (Rp)		Naik/Turun
		2012	2013		2012	2013	
1	Kabupaten Bogor	158	216	Naik	3.674	4.914	Naik
2	Kabupaten Sukabumi	128	164	Naik	1.999	1.983	Turun
3	Kabupaten Cianjur	148	97	Turun	1.973	2.181	Naik
4	Kabupaten Bandung	167	159	Turun	2.850	2.803	Turun
5	Kabupaten Garut	142	179	Naik	2.131	2.737	Naik
6	Kabupaten Tasikmalaya	106	98	Turun	1.829	1.589	Turun
7	Kabupaten Ciamis	89	95	Naik	1.839	1.738	Turun

8	Kabupaten Kuningan	68	62	Turun	1.434	1.624	Naik
9	Kabupaten Cirebon	86	97	Naik	2.033	2.289	Naik
10	Kabupaten Majalengka	129	72	Turun	1.525	1.766	Naik
11	Kabupaten Sumedang	77	81	Naik	1.467	1.643	Naik
12	Kabupaten Indramayu	97	74	Turun	1.843	2.090	Naik
13	Kabupaten Subang	57	59	Turun	1.481	1.547	Naik
14	Kabupaten Purwakarta	44	56	Naik	1.138	1.408	Naik
15	Kabupaten Karawang	76	105	Naik	2.416	2.778	Naik
16	Kabupaten Bekasi	43	0	Turun	2.639	3.083	Naik
17	Kab. Bandung Barat	72	64	Turun	1.501	1.436	Turun
18	Kota Bogor	15	26	Naik	1.355	1.542	Naik
19	Kota Sukabumi	18	28	Naik	674	842	Naik
20	Kota Bandung	37	67	Naik	3.490	4.555	Naik
21	Kota Cirebon	20	28	Naik	813	938	Naik
22	Kota Bekasi	24	36	Naik	2.499	3.026	Naik
23	Kota Depok	52	0	Turun	1.371	1.817	Naik
24	Kota Cimahi	29	25	Turun	833	1.027	Naik
25	Kota Tasikmalaya	30	36	Naik	1.035	1.094	Naik
26	Kota Banjar	16	21	Naik	513	570	Naik
TOTAL		1.935	1.956		46.363	53.033	

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 1.2 Realisasi Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012 dan 2013 di atas terdapat fenomena yang terjadi yaitu adanya peningkatan dana alokasi khusus tetapi tidak diikuti oleh belanja daerah yang malah mengalami penurunan diantaranya terjadi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis yang mengalami penurunan belanja daerah. Sedangkan, terdapat juga fenomena penurunan dana alokasi khusus tetapi belanja daerah malah mengalami peningkatan yang cukup besar hal ini dapat dilihat di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Hal ini menunjukkan pengalokasian dana alokasi umum tidak merata dalam mendanai kegiatan khusus tiap pemerintah daerahnya (Mulyadi, 2010).

Tabel 1.4
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah di Kabupaten
dan Kota Provinsi Jawa Barat (dalam milyar rupiah)

No.	Nama Kab/Kota	Pendapatan Asli Daerah (Rp)		Naik/ Turun	Belanja Daerah (Rp)		Naik/ Turun
		2012	2013		2012	2013	
1	Kabupaten Bogor	1.068	1.063	Turun	3.674	4.914	Naik
2	Kabupaten Sukabumi	185	218	Naik	1.999	1.983	Turun
3	Kabupaten Cianjur	215	204	Turun	1.973	2.181	Naik
4	Kabupaten Bandung	366	368	Naik	2.850	2.803	Turun
5	Kabupaten Garut	184	166	Turun	2.131	2.737	Naik
6	Kabupaten Tasikmalaya	60	70	Naik	1.829	1.589	Turun
7	Kabupaten Ciamis	87	90	Naik	1.839	1.738	Turun
8	Kabupaten Kuningan	97	109	Naik	1.434	1.624	Naik
9	Kabupaten Cirebon	229	240	Naik	2.033	2.289	Naik
10	Kabupaten Majalengka	103	125	Naik	1.525	1.766	Naik
11	Kabupaten Sumedang	161	144	Turun	1.467	1.643	Naik
12	Kabupaten Indramayu	164	144	Turun	1.843	2.090	Naik
13	Kabupaten Subang	120	119	Turun	1.481	1.547	Naik
14	Kabupaten Purwakarta	151	199	Naik	1.138	1.408	Naik
15	Kabupaten Karawang	658	478	Turun	2.416	2.778	Naik
16	Kabupaten Bekasi	801	913	Naik	2.639	3.083	Naik
17	Kab. Bandung Barat	136	169	Naik	1.501	1.436	Turun
18	Kota Bogor	252	315	Naik	1.355	1.542	Naik
19	Kota Sukabumi	148	143	Turun	674	842	Naik
20	Kota Bandung	1.005	1.344	Naik	3.490	4.555	Naik
21	Kota Cirebon	149	174	Naik	813	938	Naik
22	Kota Bekasi	730	871	Naik	2.499	3.026	Naik
23	Kota Depok	474	458	Turun	1.371	1.817	Naik
24	Kota Cimahi	144	155	Naik	833	1.027	Naik
25	Kota Tasikmalaya	153	139	Turun	1.035	1.094	Naik
26	Kota Banjar	54	55	Naik	513	570	Naik
TOTAL		7.909	8.485		46.363	53.033	

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 1.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2012 dan 2013 di atas terdapat beberapa fenomena diantaranya terjadi peningkatan pendapatan asli

daerah namun tidak diikuti oleh belanja daerah yang mana mengalami penurunan hal ini terjadi di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan, terdapat juga fenomena penurunan pendapatan asli daerah tetapi belanja daerah malah mengalami peningkatan yang cukup besar hal ini dapat dilihat di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya. Menurut Anggiat (2009:4) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah yang tidak diikuti dengan peningkatan belanja daerah menyebabkan adanya kesenjangan fiskal antar daerah sehingga adanya perbedaan kesiapan daerah dalam memasuki era otonomi daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prakosa (2004) yang meneliti di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni (2011) di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang signifikan untuk prediksi Anggaran Belanja Daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul “ Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dana Alokasi Umum), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat) “

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada tahun 2011-2013 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada tahun 2011-2013 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada tahun 2011-2013 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah, baik secara parsial maupun secara simultan, terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2013?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, mempelajari, menganalisis, serta menyimpulkan mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (Dana Alokasi Umum), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara parsial maupun simultan terhadap Belanja Daerah pada tahun 2011-2013 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada tahun 2011-2013 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada tahun 2011-2013 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada tahun 2011-2013 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
4. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah, baik secara parsial maupun secara simultan, terhadap Belanja Daerah pada tahun 2011-2013 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan akuntansi sektor publik mengenai pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, khususnya mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah selaku pengelola keuangan daerah, dalam menentukan Belanja Daerah di masa yang akan datang yang disesuaikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan yang diterima daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan belanjanya dan pelayanan kepada masyarakat pun dapat ditingkatkan.

